

**UPAYA IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
DAN TINDAK LANJUT DAMPAK COVID 19
SEKTOR EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

UPAYA IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT DAMPAK COVID 19
SEKTOR EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

NO	SEKTOR	PERMASALAHAN	USULAN	LANGKAH TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
1.	PARIWISATA	a. Menurunnya jumlah wisatawan karena kebijakan Nasional, Pemerintah Daerah dan para pengelola daya Tarik wisata (DTW) sebagai antisipasi Pandemi Covid-19		1. Kadisporapar Prov. Jateng telah mngirim surat kepada Kadis yang membidangi Pariwisata di Kab/Kota se-Prov. Jateng tanggal 16 Maret 2020 Nomor 556/908 perihal Penutupan Sementara Destinasi Wisata dan Tempat Hiburan a.l : a. Penutupan sementara destinasi wisata dan tempat hiburan. b. Gerakan Pembersihan di lokasi wisata dengan disinfektan (koordinasi dengan Dinkes Kab/Kota dan RS setempat). c. Membentuk Pusat Informasi. 2. Surat Gubernur kepada Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tentang Pemberian potongan harga tiket penerbangan dalam masa pemulihan pandemi Covid -19	Disporapar

		b. Penutupan sementara 563 DTW (88%) dan 76 DTW (12%) dibuka terbatas		<ul style="list-style-type: none">a. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit setempat dengan penyediaan thermal gun dan hand sanitizerb. Penyemprotan area dan sarpras dengan desinfektan pada DTW saat ditutupc. Surat himbuan dari Kepala Dinas kepada pengelola dan/atau pemerintah Kab./Kota	Disporapar
--	--	---	--	---	------------

		<p>c. Tingkat hunian hotel menurun (dibandingkan dengan tahun yang lalu):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat hunian hotel turun 11,77 poin - Tingkat rata-rata menginap turun 0,6 poin - Kunjungan wisnus turun 72% - Kunjungan wisman turun 88% 	Pengurangan Pajak Hotel dan restoran	Surat Edaran Gubernur agar menghimbau kepada Kab/Kota agar menurunkan pajak hotel dan restoran sesuai kondisi daerah masing-masing	Disporapar
2	INDUSTRI	<p>a. Kesulitan dalam penyediaan stok bahan baku impor. (51 Industri Terdampak) 7 industri belum terdampak COVID-19 dikarenakan impor RAW Material dari negara terkena COVID-19 prosentasenya kecil, pasar negara tujuan ekspor yang terkena COVID-19 prosentasenya kecil. Perusahaan-Perusahaan tersebut meliputi : 5 perusahaan tekstildan 2 mamin</p>	Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan bahan baku impor.	a. Masing – masing asosiasi agar melaporkan ke Disperindag dan akan diinput Senin 23 Maret 2020 yang berupa output produksi baik untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor	Disperindag, KADIN Jateng, Asosiasi Perusahaan di Jateng.
		<p>b. Naiknya Beban biaya operasional yang tinggi dalam proses produksi.</p>	<p>a. Bea Listrik dan BBM bagi industri diberikan kelonggaran dalam pembayaran dengan jangka waktu 3 bulan tanpa denda.</p>	PLN dan Pertamina agar memantau perkembangan keadaan kebutuhan listrik dan BBM bagi industry dan mengupayakan relaksasi pembayaran listrik (23 Maret 2020 dilaporkan kepada Gubernur).	Dinas ESDM, PLN, Pertamina

			b. Usulan ke Pemerintah pusat untuk percepatan penyusunan regulasi terkait relaksasi / kemudahan untuk persetujuan impor bahan baku dan bahan penolong	Gubernur segera menyampaikan surat kepada Kemenko Perekonomian terkait aturan pelaksanaan atas paket stimulus ekonomi kedua untuk menangani dampak COVID 19.	Biro Perekonomian
--	--	--	--	--	-------------------

			bagi industri yang terdampak sebagai tindak lanjut statement pemerintah Kemenko bidang perekonomian tanggal 13 Maret 2020 tentang pengumuman stimulus ekonomi kedua untuk menangani dampak COVID 19		
		c. Kelangkaan alkohol dan masker	Usulan ke Dirjen Bea Cukai,tentang himbauan pembatasan ekspor alkohol	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Gubernur Jawa Tengah kepada MenteriKeuangan RI cq Dirjen Bea dan Cukai Nomor 512/0006363, tanggal 19 Maret 2020 tentang Permohonan Pembatasan Ekspor Bahan Kimia Ethanol b. Telah tertib Permendag Nomor : 23 Tahun 2020,tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptic, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker tanggal 16 Maret 2020 c. Suear Edaran Kepala Dinas Nomor : 530/1465 tanggal 17 Maret 2020 ,Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo dan Kepala BPMPTSP Kabupaten Karanganyar tentang Himbauan Pemasaran Ethanol bagi IKM Jateng d. Ijin sertifikasi produksi yang 	Disperindag

				Dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan telah terbit pada tanggal 16 Maret 2020 sehingga produsen masker PT Edvan Brebes dan perusahaan tersebut mengajukan Verifikasi Teknis pada tanggal 23 Maret 2020	
3.	PERDAGANGAN	PERDAGANGAN LUAR NEGERI a. Beberapa event pameran luar negeri walaupun masih on schedule, dikhawatirkan akan ditunda/dibatalkan	Mempersiapkan alternatif kegiatan serupa akan kemungkinan dibatalkannya kegiatan pameran, seperti business meeting/matching via teleconference dengan buyer LN melalui bantuan Atdag/ITPC	Disperindag Prov. Jateng telah mengajukan usulan pergeseran anggaran melalui surat Ka. Disperindag Prov. Jateng No. 050/1344 tanggal 16 Maret 2020 Kepada Bapak Sekretaris Daerah Prov. Jateng	Disperindag, BI, BKI, Pelindo III, GPEI, GINSI
		b. Ekspor Penurunan nilai ekspor ke negara tujuan ekspor yang terpapar virus Corona	Ekspor a. Optimalisasi pasar domestik b. Kampanye Aku Cinta Produk Indonesia (100% Indonesia) c. Mencari pasar non tradisional	Disperindag Prov. Jateng telah mengajukan usulan pergeseran anggaran melalui surat Ka. Disperindag Prov. Jateng No. 050/1344 tanggal 16 Maret 2020 Kepada Bapak Sekretaris Daerah Prov. Jateng.	Disperindag, BKI, Pelindo III, GPEI, GINSI

		<p>c. Impor Kemudahan dan percepatan proses untuk bongkar muat bahan baku</p>	<p>a. Bea cukai agar mempermudah proses clearance dokumen (alkes, bahan pokok dan bahan baku industry strategis)</p>	<p>a. Menteri Keuangan akan melakukan penyederhanaan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan (Lartas) untuk aktivitas ekspor disamping itu dokumen <i>health certificate</i> (untuk makanan minuman, produk-produk dari hewani, pertanian dan perkebunan, dll) dan <i>V-Lega</i> (untuk kayu dan produk kayu) tidak lagi menjadi dokumen persyaratan ekspor;</p> <p>b. Menteri Keuangan akan melakukan penyederhanaan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan (Lartas) untuk aktivitas impor khususnya bahan baku yang tujuannya untuk meningkatkan kelancaran dan ketersediaan bahan baku;</p> <p>c. Peraturan untuk kedua hal tersebut diatas sedang dalam proses penyusunan;</p> <p>d. Telah disusun Konsep Surat Gubernur kepada Pemerintah Pusat untuk percepatan kedua hal tersebut (point a dan b) oleh Biro Perekonomian;</p> <p>e. Kemendag pada tanggal 19 Maret 2020, telah membebaskan</p>	<p>Disperindag, BKI, Pelindo III, GPEI, GINSI</p>
--	--	---	--	--	---

				<p>kewajiban ijin impor (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Surat Persetujuan Impor) kepada para importir bawang putih dan bawang bombay.</p> <p>f. Mengadakan Sosialisasi tentang Stimulus Fiskal untuk PPH Pasal 22 Impor.</p>	
			b. Pemanfaatan gudang – gudang perusahaan untuk karantina.	b. Memaksimalkan fungsi dan kapasitas PLB untuk membuat buffer stok bahan baku	Disperindag, BKI, Pelindo III, GPEI, GINSI
		<p>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</p> <p>a. Adanya panic buying terhadap pembelian bahan pokok, hal ini adanya keawatiran jika terjadi kelangkaan</p> <p>b. Potensi kelangkaan bahan pokok utamanya yang bersumber dari impor dan terbatas substitusinya</p>	<p>a. Melakukan sidak ke gudang-gudang distributor untuk mengantisipasi adanya penimbunan bahan pokok`</p> <p>b. Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak memborong bahan pokok dalam jumlah besar</p> <p>c. Koordinasi dengan pusat terkait Ketepatan waktu realisasi ijin impor khususnya untuk Bapak</p> <p>d. Pemantauan harga di tingkat pedagang ,distributor dan importir</p> <p>e. Kerjasama dengan satgas pangan didalam pemantauan dan penindakan ketersediaan</p>	<p>a. Menyiapkan produksi substitusi komoditas impor bekerjasama dengan stakeholder TPID</p> <p>b. Menyiapkan data stok ditingkat petani, pedagang, distributor dan importer bekerjasama dengan Dishanpan dan Dispertanbun Prov. Jateng</p> <p>c. Menyiapkan gudang-gudang penyimpanan komoditas yang terdekat dengan potensi komoditas di Kabupaten Kota</p> <p>d. Medorong gudang-gudang swasta maupun Pemerintah agar menjadi gudang ber SRG</p> <p>e. Kepala Disperindag Prov.</p>	Disperindag, Satgas Pangan, Distanbun, Dishanpan, TPID, APPINDO

			<p>stok dan pengendalian harga</p> <p>f. Pemberian informasi secara periodic tentang ketersediaan stok kebutuhan pokok bekerjasama dengan kabupaten kota agar disampaikan ditingkat masyarakat untuk menghindari panic buying</p> <p>g. Menghimbau kepada kabupaten kota yang mempunyai kewenangan pembinaan pasar rakyat untuk mengawasi dan menjaga sanitasi dan kebersihan pasar rakyat.</p>	<p>Jateng agar mengkoordinasikan dengan Dinas yang membidangi Perdagangan di kab/Kota agar menyusun dan menerapkan protocol Pasar Rakyat.</p>	
4.	UKM/KOPERASI	<p>a. Kelangkaan serta kenaikan harga bahan baku, semisal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harga gula pasir dari semula 13rb/kg menjadi 18 rb/kg. - Harga bawang bombay yang mencapai 70rb/kg. - Harga rempah – rempah (jahe, kencur, temulawak) yang mencapai 100rb/kg. - Berkurangnya pasokan bahan baku kain sutra dari RRT. - Kenaikan harga masker yang mencapai 300rb/dos. 	<p>a. Menyiapkan pemetaan daerah – daerah potensial sebagai alternatif penyedia bahan baku sekaligus mendorong penggunaan bahan baku lokal sebagai substitusi.</p> <p>b. Membentuk posko bersama dengan Dinas Koperasi UKM Kab/Kota dan stakeholder terkait untuk melakukan surveillance atas kondisi harga dan ketersediaan bahan baku bagi UKM Jawa Tengah.</p>	<p>a. Menggantikan gula tebu dengan gula semut sebagai substitusi (mohon ada bantuan/kerjasama dengan Bank Indonesia terkait pendistribusian Quick Response (QR) Code Indonesia Standar (QRIS) terkait data pasokan/stock komoditas gula semut dan kebutuhan UKM terhadap gula. Adapun kapasitas produksi gula semut di Jawa Tengah (Banyumas, Purworejo, Kebumen dan Banjarnegara) rata-rata per bulan 150 ton</p> <p>b. Untuk mengatasi kelangkaan empon-empon</p>	<p>Diskop UKM, Disperindag, Kepolisian, Kab/Kota.</p>

				akan dibantu dan difasilitasi dari Distanbun Prov Jateng c. Untuk pelabelan "halalisasi" agar dibantu oleh Pemprov.	
--	--	--	--	--	--

		<p>b. Menurunnya permintaan atas produk KUKM baik pada gerai – gerai penjualan, toko, warung, pusat – pusat perbelanjaan hingga pada marketplace, yang disebabkan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekhawatiran masyarakat atas jaminan keamanan produk – produk KUKM - Turunnya tingkat kunjungan masyarakat ke pusat – pusat perbelanjaan, pusat – pusat keramaian - Berkurangnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara akibat travel warning ataupun penutupan destinasi wisata pada kawasan wisata unggulan yang selama ini menyediakan produk – produk KUKM Jateng seperti Jogja dan Bali. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong gerakan kampanye aman terhadap penggunaan produk – produk KUKM. b. Menyiapkan pemetaan potensi pasar – pasar baru, baik tingkat nasional ataupun internasional, bagi produk KUKM Jawa Tengah c. Memberikan pendampingan kepada KUKM yang melakukan kegiatan ekspor untuk melakukan renegotiasi kontrak dengan mitra dagang. d. Mengoptimalkan peran KUKM sebagai salah satu penyedia barang/jasa terkait rencana Pemerintah Pusat untuk percepatan belanja dari APBN maupun APBD. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat anjuran oleh Bapak Gubernur ataupun Bupati/Walikota. b. Promosi produk/industri UMKM Jawa Tengah dengan promosi antar provinsi secara online. c. pengembangan tenun dan batik lokal karena produk printing China terkendala. d. UMKM agar dapat mengembangkan peluang dengan menggunakan bahan baku local. 	<p>Diskop UKM, Disperindang, PemKab/Kota</p>
--	--	--	---	--	--

		<p>c. Keterbatasan kemampuan KUKM untuk meningkatkan kapasitas produksi guna menyediakan substitusi atas produk – produk impor</p>	<p>a. Sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia yang melonggarkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM), maka terdapat potensi penambahan likuiditas bagi perbankan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh KUKM untuk dapat mengakses pembiayaan guna memperkuat struktur permodalannya.</p> <p>b. Mendorong pendampingan serta upaya kemitraan bagi KUKM untuk meningkatkan produktivitasnya</p>	<p>Surat kepada Perbankan di Jateng agar melaksanakan kebijakan Bank Indonesia/OJK</p>	<p>Biro Perekonomian Diskop UKM, OJK</p>
		<p>d. Berkurangnya permintaan berdampak pada cashflow KUKM sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan pembayaran atas tagihan – tagihan maupun pinjaman kredit terhadap perbankan/non-perbankan.</p>	<p>Memberikan pendampingan kepada KUKM untuk melakukan penjadwalan kewajiban pembayaran hutang kepada perbankan atau pihak ketiga lainnya.</p>	<p>Perbankan melalui OJK agar menindaklanjuti percepatan kebijakan stimulus baik untuk restrukturisasi maupun untuk UKM yang sudah berhenti produksi</p>	<p>Diskop UKM Bank Jateng</p>
		<p>e. Pengurangan tenaga kerja sektor UKM akibat penyesuaian kapasitas produksi</p>	<p>a. Mempercepat pelaksanaan program program padat karya yang bersumber dari dana desa sebagai alternative</p>		<p>Diskop UKM</p>

			<p>pekerjaan bagi tenaga kerja KUKM yang terdampak perumahan sementara</p> <p>b. Memberikan pembekalan pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja yang terdampak perumahan sementara.</p>		
		<p>e. Pasar ekspor UKM, saat ini mulai melakukan pengalihan pasar ke domestik akibat pembatasan impor dari negara tujuan. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi profit margin sehingga berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak negara.</p>	<p>a. Mendorong produk KUKM untuk dapat menjadi alternatif produk impor pada pasar lokal untuk kalangan menengah atas sehingga tetap dapat menjaga tingkat keuntungannya.</p> <p>b. Melakukan pemetaan terhadap alternative pasar ekspor bagi produk KUKM Jawa Tengah.</p>		Diskop UKM Disperindag
		<p>f. Penumpukan Produksi</p>	<p>a. Ada Stimulus / upaya untuk pembelian produk UKM</p>	<p>Mengajukan permohonan atas stimulus dari Kemenkeu agar dapat membeli stock UMKM yang menumpuk (antara lain , gula semut, UKM makanan)</p>	

5.	PANGAN	<p>a. Kebutuhan bahan pokok</p> <p>1. Gula</p>	<p>a. Stok gula Bulog kosong</p> <p>b. Stock di distributor / pedagang masih 532,5 ton</p> <p>c. (HET Rp 12.500, Harga Pasaran Rp 16.000 s.d Rp 17.000)</p>	<p>a. Percepatan impor Raw sugar untuk diproses menjadi Gula Kristal Putih</p> <p>b. Telah diterbitkan tambahan persetujuan import sebesar 268.000 ton, termasuk didalamnya Bulog mendapat penugasan untuk impor sebesar 30.000 ton raw sugar yang akan diolah di PT. Gendis Multi Manis Blora.</p> <p>Catatan: Gambaran Kondisi stok Gula Jateng : Stok Gula Bulog kosong, stok per tanggal 17 Maret 2020 di distributor masih 532,5 ton dan stok pedagang sebesar 3,29 ton cukup untuk memenuhi sampai dengan akhir Maret 2020, meskipun demikian setiap minggu pedagang mendapat pasokan sebanyak 27,39 ton.</p>	<p>Dishanpan, Distanbun, Disperindag</p>
----	--------	--	---	--	--

			- Temulawak : 881 ton		
		c. Asupan gizi dan keamanan pangan bagi masyarakat Jawa Tengah terganggu dari adanya dampak wabah corona		<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Desa Mandiri Pangan sebagai sarana peningkatan gizi melalui peningkatan protein hewani bagi masyarakat miskin 34 desa b. Penyederhanaan perijinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). c. Pemantauan keamanan pangan secara rutin melalui Tim Jejaring Keamanan Daerah dan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah. 	Dishanpan

6.	TENAGA KERJA	<p>a. Perlindungan Kesehatan Pekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan thermal gun, hand sanitizer, masker dan alat pelindung diri lainnya bagi pekerja yang memasuki tempat kerja <p>b. Perbandingan shift kerja yang masih menumpuk pada shift tertentu (mempengaruhi aturan social distancing)</p> <p>c. Pekerja Migran Indonesia tertunda/batal diberangkatkan</p>	<p>a. Penerapan Protokol Kesehatan di Perusahaan</p> <p>b. Optimalisasi Poliklinik Perusahaan</p> <p>c. Penyediaan POSKO Kesehatan dengan petugas medis 24 jam</p> <p>a. Pembagian shift kerja yang merata sehingga tidak terjadi penumpukan pekerja</p> <p>a. Tidak melakukan aktivitas CPMI di BLKLN</p>	<p>a. SE Menteri Ketenagakerjaan RI no M/3/HK.04/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid 19</p> <p>b. Surat Gubernur kepada Bupati dan Walikota no 560/1751 tanggal 18 Maret 2020 perihal SE Menteri Ketenagakerjaan</p> <p>c. Surat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker RI nomor B.5/51/45.0202/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang kewaspadaan Penyebaran Penyakit Pneumonia berat yang tidak diketahui penyebabnya pada pekerja dan sudah ditindaklanjuti surat Kadis Naker Prov Jateng ke Kadis Naker Kab/Kota se Jateng</p> <p>a. SK Menteri Ketenagakerjaan RI no 151 tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia</p> <p>b. Surat Kadisnakertran Jateng ke Disnaker Kab/Kota, APJATI,</p>	Disnakertrans Prov/Kab/Kota
----	--------------	---	--	---	-----------------------------

				ASPATAKI, Kepala P3MI nomor 440/1654 tanggal 16 Maret 2020 hal Pencegahan Covid 19 di BLKLN P3MI	
		<p>a. Perlindungan Upah Pekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan pembayaran upah - Tidak ada lembur/overtime - Pekerja dirumahkan 	<p>a. Memaksimalkan LKS Bipartit dan Tripartit</p> <p>b. Penerapan Regulasi UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p>	<p>a. Menyelesaikan kasus-kasus ketenagakerjaan oleh pengawai pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Mediator Prov/Kab/Kota</p> <p>b. Asosiasi Menjamin tidak ada PHK dan akan tetap memberikan THR dan apabila ada kesulitan akan dibantu perbankkan</p>	Disnakertarans APINDO, KADIN
7.	INVESTASI	a. Terdapat penundaan investasi asing ke Jawa Tengah (China, Taiwan dan Hongkong)	a. Mendorong realisasi kinerja investasi PMDN	<p>a. Melakukan pengawalan pelaksanaan Perpres 79/2019 terutama dari Swasta.</p> <p>b. Melakukan promosi investasi diluar negara terdampak/minimal dampak</p>	DPMPTSP
		b. Keterlambatan masuknya	a. Mendorong kinerja investasi di bidang substitusi impor;	a. Identifikasi bahan baku, bahan penolong dan komponen yang terdampak;	DPMPTSP Disperindag

		<p>bahan baku/bahan penolong, komponen mesin dan peralatan untuk proses produksi</p>	<p>b. Mendorong pengembangan kemitraan antara UMKM dengan investor PMA/PMDN; c. Fasilitasi dan mempertemukan antara perusahaan penyedia material pengganti dengan perusahaan yang membutuhkan (terdampak).</p>	<p>b. Identifikasi perusahaan dalam negeri yang memproduksi bahan baku, bahan penolong dan komponen sebagai material pengganti; c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terkait dengan implementasi kebijakan kewajiban bermitra bagi PMA/PMDN.</p>	
		<p>c. Terlambatnya penyelesaian proyek karena keterlambatan barang modal, tenaga ahli/teknisi pada industri</p>	<p>a. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap progress tahapan konstruksi PMA/PMDN b. Fasilitasi proses kepabeanan terkait dengan importasi material dan mesin-mesin produksi utamanya dari China dan negara-negara yang ditetapkan terdampak.</p>	<p>a. Identifikasi perusahaan-perusahaan pada tahapan konstruksi yang menggunakan material dan tenaga ahli dari China; b. Meningkatkan koordinasi dalam rangka fasilitasi dengan instansi vertikal terkait dengan kepabeanan.</p>	<p>DPMPTSP</p>

8.	Energi	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsumsi untuk industry, bisnis dan rumah tangga s.d pebruari tetap tumbuh b. Stok BBM dan elpiji termasuk elpiji 3 kg tersedia cukup aman dan Pertamina siap waspada untuk pengamanan stok dan distribusi c. Proyek2 startegis seperti RDMP Cilacap PLTU Batang, Tanjung Jadi, S2P tetap berjalan dengan tetap kewaspadaan d. Industri Semen (PT. SBI, SI, Bima, Semen Grobogan) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu kajian mendalam untuk aspirasi dunia industry yang menghadapi relaksisasi pembayaran tagihan rekening listrik tanpa denda b. Meminta dunia usaha tetap menjaga ritme produksi untuk menghindari pengurangan tenaga kerja dan menjaga kesiapan saat pasar membaik 3 bulan kedepan c. Penerapan protocol kesehatan dalam menjaga meluasnya COVID-19 	Surat Kepala Dinas ESDM Prov Jateng Nomor : 541/2750 tanggal 20 Maret 2020 kepada General Manager PT Pertamina (Persero) MOR IV Perihal Permohonan Data Kesiapan BBM dan LPG	Dinas ESDM, Pertamina, PLN
----	--------	---	--	---	----------------------------

		<p>Berjalan dengan hambatan pasokan permesinan dari cina dan TKA asal Cina yang terhambat kembali ke Indonesia</p> <p>e. Produksi AMDK tetap berjalan dengan baik, hambatan pasar retail ditempat pariwisata</p>			
		<p>PT Semen Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penurunan ketersediaan bahan baku <10% dari kondisi normal, khususnya terhadap barang import dari negara terdampak (proses produksi dan shipment delay di tempat asal barang, dan tambahan proses karantina di lokasi kedatangan barang). Contoh : fire brick ex China - Kapasitas produksi belum terdampak, tetapi ada potensi untuk penurunan kapasitas produksi Semen, Clinker dan Readymix-Concrete menyesuaikan market - Terdapat penurunan penjualan hingga <10% dari kondisi normal, 			Dinas ESDM

		<p>terutama terkait ekspor terak ke Cina dan negara lain yang terdampak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penurunan laba bersih hingga <10% dari kondisi normal akibat tambahan biaya operasional dan sedikit pengurangan pendapatan terak" 			
9	PERHUBUNGAN	<p>Penyebaran Covid 19 di area publik transportasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum pada moda darat, laut, udara dan kereta api b. Menurunnya kegiatan ekspor dan impor di pelabuhan tanjung mas semarang 	Membuat protocol penanganan COVID 19 di area dan transportasi public bersama stakeholder terkait.	Dinas Perhubungan agar membantu kemudahan proses refund tiket.	Dishub Jateng dan stakeholder terkait
10.	PERBANKAN	Antisipasi Perlambatan ekonomi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunkan suku Bunga untuk memberikan stimulus terhadap perekonomian b. Memberikan keringanan bunga bank, dan reschedule kredit c. Memberikan stimulus (POJK No. 11/POJK.03/2020) <ul style="list-style-type: none"> 1) Realisasi penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan ketepatan pembayaran poeoe/bunga untuk kredit s/d 10 milion 2) Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong perbankan Jateng untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Paket Stimulus Ekonomi Kedua untuk menangani dampak Covid 19. OJK telah menyampaikan surat ke Perbankan nomor S-6 /2D.03/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penerbitan POJK no 11 / POJK.03/2020. b. Pemprov Jateng telah menyampaikan surat kepada BPR BKK se Jateng nomor 	Perbankan OJK

		<p>Menghadapi Covid-19 BI meempuh 7 kebijakan</p>	<p>kredit menjadi lancar (untuk restrukturisasi tidak ada batasan plafon) Untuk debitur yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung penyebaran virus Covid-19 . Restrukturisasi bias dilakukan antara lain dengan penurunan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit , pengurangan tunggakan bunga/ pokok, penambahan plafon . Bank tetap harus melakukan analisis terhadap debitur untuk menilai prospeknya.</p>	<p>584.2/0005774 tanggal 19 Maret 2020, perihal Kebijakan Restrukturisasi Kredit.</p> <p>c. Pemprov telah menyampaikan Surat Kepada Direksi Pt. BPD Jawa Tengah nomor: 581/000/4954 tanggal 20 Maret 2020 perihal Kebijakan Restrukturisasi Kredit.</p> <p>a. Memperkuat intensitas kebijakan triple interfention b. Memperpanjang tenor Repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari c. Menambah frekwensi lelang FX swop tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari 3 kali seminggu menjadi setiap hari d. Memperkuat instrument term deposit valuta asing e. Mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah dalam negeri (vostro) bagi investor</p>	<p>Bank Indonesia</p>
--	--	---	---	--	-----------------------

				<p>asing sebagai underlying dalam transaksi DNDF.</p> <p>f. Memperluas kebijakan insentif pelonggaran GWM harian dalam rupiah sebesar 50 bps</p> <p>g. Memperkuat kebijakan system pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran Covid-19, melalui ketersediaan uang layak edar yang higienis dan menghimbau masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran secara non-tunai, mendorong penggunaan pembayaran non-tunai dengan menurunkan biaya Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Dan mendukung penyaluran dana non-tunai program-program Pemerintah.</p>	
11.	PAJAK	Beban pajak pelaku usaha	a. Pengusaha agar memanfaatkan fungsi kepastian dan kawasan berikat karena terdapat	Perpajakan agar melaksanakan kebijakan Pemerintah Paket Stimulus Ekonomi Kedua untuk menangani dampak Covid 19	Kantor Pajak

			<p>fasilitas bebas bea masuk dan pajak impor serta kemudahan pengeluaran barang dari pelabuhan</p> <p>b. Masih ada pertumbuhan peningkatan penerimaan pajak sebesar 6% di Jawa Tengah dibanding tahun lalu di bulan yang sama dan Pajak PPN-BN masih tumbuh 17% di Jawa Tengah</p> <p>d. PMK kebijakan melalui PPh Pasal 25 dan 21 belum ada</p>	<p>Pemprov menyampakan surat kepada Menko Perekonomian agar PMK terkait pelaksanaan relaksasi melalui PPh Pasal 21 dan 25 segera diterbitkan.</p>	<p>Biro Perekonomian</p>
12.	INFRASTRUKTUR (KONSTRUKSI)	a. Adanya ancaman tersuspect corona karena interaksi kerja yang tidak terhindarkan	<p>a. Mendorong Penyedia Jasa untuk melakukan cek kesehatan bagi pekerja secara rutin;</p> <p>b. Mendorong pekerja untuk merutinkan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) di lokasi proyek secara terbuka;</p> <p>c. Pengharusan Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja</p>	<p>b. Pemetaan konsentrasi masa pekerja konstruksi tetap bekerja dengan standar protokol konstruksi dari Binkon Kemen PUPR dan Dinas</p> <p>c. Untuk pelaksanaan Pemeliharaan rutin tetap dilaksanakan, karena menyangkut upah/JPS pekerja miskin dan sehat. Tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan saat mulai bekerja, apabila sakit hak mereka tetap diberikan</p> <p>d. Untuk pekerjaan terkontrak, pada umumnya masih dalam persiapan, tapi tetap berjalan schedule sambil menunggu</p>	<p>PU BMCK</p>

		<p>b. Adanya ancaman tersuspect corona dengan kegiatan yang melibatkan massa yaitu dengan ditundanya Workshop Sistem Manajemen Mutu, Bimbingan Teknis (Bintek) Pengawasan Konstruksi, Peringatan Hari Air Dunia XXVIII 2020 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Sarasehan Hari Air Dunia XXVIII 2020, Penilaian Lapangan Komunitas Peduli Sungai, Penilaian Paparan Komunitas Peduli Sungai, Pembinaan Masyarakat Dalam Rangka Konservasi SDA, Lomba Petugas OP Irigasi dan Lomba P3A.</p> <p>c. Adanya ancaman tersuspect corona sehingga target fisik pekerjaan tidak tercapai sesuai rencana karena interaksi kerja yang tidak terhindarkan</p>	<p>a. Ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan</p> <p>a. Membentuk Satgas Pencegahan COVID -19</p> <p>i. Dinas PU SDA TARU Prov. Jateng bersama konsultan pengawas dan kontraktor membentuk Satgas pencegahan COVID-19.</p> <p>ii. Satuan tugas tersebut berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota yang mewakili Dinas PU SDA TARU</p>	<p>kebijakan tentang force majeure.</p> <p>Apabila tidak tercapai target fisik yang direncanakan di tahun berjalan maka akan diprogramkan di tahun berikutnya</p>	<p>PU SDA TARU</p>
--	--	--	--	---	--------------------

			<p>Prov. Jateng, Konsultan, Kontraktor, Subkontraktor, Vendor Supplier.</p> <p>iii. Satuan Tugas tersebut memiliki tugas tanggung jawab dan kewenangan melakukan</p> <ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi Kegiatan pendahuluan baik dlm pekerjaan konsultansi maupun konstruksi berupa pertemuan konsultasi masyarakat (PKM).- Edukasi- Promosi teknik- Metode pencegahan COVID- 19- Pemeriksaan (<i>examination</i>)potensi terinfeksi kepada semua orang, baik para manager, insinyur, arsitek, karyawan/staf, mandor, pekerja dan tamu proyek <p>b. Penyediaan Fasilitas Kesehatan di Lokasi Pekerjaan</p> <p>i. Kontraktor wajib menyediakan ruang klinik di lokasi pekerjaan dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai, seperti</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>tabung oksigen, pengukur suhu badan (<i>thermoscan</i>), pengukur tekanan darah, obat-obatan dan petugas medis.</p> <p>ii. Kontraktor wajib memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan rumah sakit dan/atau pusat kesehatan masyarakat terdekat dengan lapangan proyek untuk tindakan darurat (<i>emergency</i>).</p> <p>iii. Kontraktor wajib menyediakan fasilitas pengukur suhu badan (<i>thermoscan</i>), pencuci tangan dengan sabun diisfektan (<i>hand sanitizer</i>) tissue, masker di kantor dan lapangan proyek bagi para manager, insinyur,arsitek,karyawan/staf, mandor, pekerja dan tamu proyek</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>c. Pelaksanaan Pencegahan COVID-19 di Lokasi Pekerjaan</p> <p>i. Satuan Tugas memasang poster (<i>flyers</i>) baik digital maupun fisik tentang himbauan/anjuran pencegahan COVID-19 seperti mencuci tangan, memakai masker untuk disebarluaskan atau dipasang di tempat-tempat strategis di lokasi pekerjaan.</p> <p>ii. Satuan Tugas bersama Petugas Medis harus menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari (<i>safety morning talk</i>).</p> <p>iii. Satuan Tugas melarang seseorang yang sakit dengan indikasi suhu ≥ 38 derajat Celcius (seluruh manager insinyur, arsitek, karyawan/staf, mandor, pekerja dan tamu proyek) datang ke lokasi pekerjaan.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>iv. Petugas Medis melaksanakan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja dan karyawan bersama Satuan Pengamanan Proyek (<i>Security Staff</i>) dan Petugas Keamanan setiap pagi, siang dan sore.</p> <p>v. Apabila ditemukan manager insinyur, arsitek, karyawan/staf, mandor dan pekerja di lokasi pekerjaan terpapar virus COVID-19, Petugas Medis dibantu Petugas Keamanan proyek melakukan isolasi dan penyemprotan disinfektan pada tempat, fasilitas, pegangan dan peralatan kerja.</p> <p>d. Menghentikan sementara pekerjaan lapangan jika terjadi indikasi pekerja terpapar virus COVID-19.</p> <p>e. Membuat kerjasama penanganan suspect COVID-19 dengan Rumah Sakit dan Puskesmas setempat.</p>		
--	--	--	---	--	--

13.	DAMPAK PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI APBD/APBN		a. Percepatan proses penggeseran perincian anggaran dari OPD terkait kegiatan pameran/promosi ke luar negeri agar dialihkan untuk Jateng Sale.		BPKAD dan OPD Terkait
-----	--	--	---	--	--------------------------

		<p>Pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat (Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).</p>	<p>b. Untuk kegiatan kunjungan ke luar negeri agar dapat dilakukan reschedule dan dengan dilakukan secara selektif</p> <p>c. Peningkatan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p> <p>d. Subsidi distribusi pangan dalam rangka safety net economy</p> <p>e. Penyediaan bibit tanaman bio farmaka terutama empon-empon untuk tanaman di bawah tegakan kawasan hutan</p>	<p>- Kegiatan Dishanpan perlu penambahan anggaran sebanyak Rp 1,2 M untuk penambahan 100 ton</p> <p>- Perlu menambahkan anggaran pada Dishanpan untuk Subsidi Distribusi Pangan sebesar 1 Miliar</p> <p>20 hektar @Rp50 juta = Rp. 1 Miliar</p> <p>a. Pengadaan yang terkait dengan Covid-19 dapat dilakukan dengan penunjukan langsung</p> <p>b. Relaksasi waktu penyelesaian pekerjaan dengan cara addendum kontrak</p> <p>c. Kegiatan yang akan dialihkan untk penanganan Covid-19 kami tutup tayangan lelangnya di SPSE</p>	<p>Dishanpan,</p> <p>Dishanpan</p> <p>Distanbun, DLHK</p>
--	--	---	---	---	---